



**SALINAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
NOMOR : 229/K/X-X.3/07/2011  
TENTANG  
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI  
JABATAN STRUKTURAL ESELON IV  
PADA  
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

---

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melengkapi pengalaman penugasan di satuan kerja pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian, dipandang perlu dilaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk keperluan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 jo. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/SK/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia jo. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/SK/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 362/K/X-X.3/12/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dalam bidang Kepegawaian kepada Pejabat Struktural (unsur pelaksana) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

**Memperhatikan** : Putusan Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terakhir pada tanggal 9 Juli 2011.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya selama memangku jabatan tersebut serta mengangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan sebagaimana disebutkan dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Biaya yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian para pejabat struktural tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun dinas 2011.

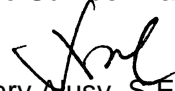
**KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 15 Juli 2011

---

Sesuai dengan Keputusan tersebut  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia

  
Fachry Alusy, S.E., M.Si  
NIP.195304141979031004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Hendar Ristriawan, S.H., M.H.  
NIP. 195803211978021001

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan;
7. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
8. Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara di Jayapura;
9. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
10. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;

11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang, Pekanbaru, Batam, Bengkulu, Bandung, Yogyakarta, Gorontalo, Ternate, dan Manokwari;
13. Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara, Inspektur Utama, Para Tortama, dan Para Kepala Biro pada Setjen BPK RI;
14. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Setjen BPK RI (masing-masing 5x);
15. Kepala Kantor Perwakilan c.q Kepala Sekretariat Perwakilan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPK dan Program Pemeriksaan Keuangan Negara, Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat;
16. Kepala Kantor Cabang Utama PT Taspen (Persero) DKI Jakarta;
17. Kepala Kantor Cabang PT Taspen (Persero) di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Bandung, Yogyakarta, Gorontalo, Ternate, dan Manokwari.

**Petikan** Keputusan ini disampaikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN

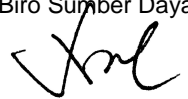
: SALINAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 NOMOR : 229 /K/X-X.3/07/2011  
 TANGGAL : 15 JULI 2011

NO	NAMA NIP	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN		TUNJANGAN JABATAN	KET.
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suandi, S.E. Ak NIP. 197212131998031002	Bandung, 13 Desember 1972	Penata / (III/c)	Pemeriksa Muda BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau  ( - )	Kepala Sub Bagian Sekretariat Anggota IV pada Biro Sekretariat Pimpinan  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-
2.	Nila Eka Putri, S.E., M.Ak, Ak. NIP. 197512091996022001	Muara Bungo, 09 Desember 1975	Penata / (III/c)	Pemeriksa (T) pada Inspektorat Utama  ( - )	Kepala Sub Bidang I.B.1 pada Inspektorat Utama  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-
3.	Muhammad Taufiq, S.E. NIP. 196207201989031002	Medan, 20 Juli 1962	Penata Tk. I / (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Riau  (Eselon IV.A)	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Balai Diklat Medan pada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-
4.	Sri Herawati, S.E., MIMS. NIP. 197405261994022001	Jakarta, 26 Mei 1974	Penata / (III/c)	Kepala Seksi Manajemen Intern Auditorat II.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara II  (Eselon IV.A)	Pemeriksa Muda pada Auditorat Utama Keuangan Negara II  ( - )	-	-
5.	Lolita Setyawati, S.E. Ak NIP. 197511051999032003	Salatiga, 05 Nopember 1975	Penata / (III/c)	Pemeriksa Muda pada Auditorat Utama Keuangan Negara II  ( - )	Kepala Seksi Manajemen Intern Auditorat II.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara II  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-
6.	Widia Woluningrum, S.E. NIP. 197203081997032003	Padang Panjang, 08 Maret 1972	Penata Tk. I / (III/d)	Pemeriksa (T) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau  ( - )	Kepala Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Riau  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-
7.	Suharto, S.E. NIP. 196703201987031001	Medan, 20 Maret 1967	Penata Tk. I / (III/d)	Pemeriksa Muda BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  ( - )	Kepala Sub Bagian Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Riau  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-
8.	Sudarmono, S.H. NIP. 197307062002121004	Gunung Kidul, 06 Juli 1973	Penata / (III/c)	Pemeriksa (T) pada Biro Sumber Daya Manusia  ( - )	Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-

9.	Dwihansyah Agus Nugraha, S.Kom, M.Eng NIP. 197408271999031002	Jakarta, 27 Agustus 1974	Penata Tk. I / (III/d)	Kepala Sub Bagian SDM, Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara  (Eselon IV.A)	Kepala Sub Bagian Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-
10.	Drs. Maruto S. N. NIP. 196210081983031002	Yogyakarta, 08 Oktober 1962	Penata Tk. I / (III/d)	Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  (Eselon IV.A)	Kepala Sub Bagian Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-
11.	Suprihatinah, S.E., M.Si., Ak. NIP. 197105271997032003	Purworejo, 27 Mei 1971	Penata Tk. I / (III/d)	Kepala Seksi Litbang Organisasi pada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara  (Eselon IV.A)	Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-
12.	Edi Surono, S.H. NIP. 197601202003121004	Bantul, 20 Januari 1976	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Pemeriksa Pertama pada Auditorat Utama Keuangan Negara V  ( - )	Kepala Sub Bagian SDM, Hukum, dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-
13.	Ronni Akbar, S.H. NIP. 197604082002121008	Jakarta, 08 April 1976	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Pemeriksa Pertama BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat  ( - )	Kepala Sub Bagian SDM, Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-
14.	Muh. Nasir, S.E. NIP. 196305031989031003	Balinappang, 03 Mei 1963	Penata Tk. I / (III/d)	Kepala Sub Bagian SDM, Hukum, dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo  (Eselon IV.A)	Kepala Sub Bagian Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat  (Eselon IV.A)	Rp. 540.000,00.	-

Daftar ini memuat nomor urut 1 sampai dengan 14

Sesuai dengan keputusan tersebut  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

  
Fachry Alusy, S.E., M.Si.  
NIP. 195304141979031004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Hendar Ristriawan, S.H., M.H.  
NIP. 195803211978021001